

STRATEGI *FRAMING* DUTERTE TERHADAP KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*

TAHUN 2016 - 2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD HAFIZH QHORIEQ AL ASY'ARI

20323126

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

STRATEGI *FRAMING* DUTERTE TERHADAP KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*

TAHUN 2016 - 2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD HAFIZH QHORIEQ AL ASY'ARI

20323126

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI *FRAMING* DUTERTE TERHADAP KEBIJAKAN WAR
***ON DRUGS* TAHUN 2016 - 2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Juni 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
3. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
4. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independensaya sendiri, dan bahwasemua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 Juni 2024,



Muhammad Hafizh Qhorieq Al Asy'ari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DUTERTE SERTA DAMPAKNYA DI LEVEL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL	16
2.1 Narkoba di Filipina dan Kebijakan <i>War on Drugs</i>	16
2.1.1 Upaya untuk Mengatasi Masalah Narkoba.....	18
2.1.2 Penerapan Peraturan <i>Oplan Tokhang</i> dan <i>Oplan High Value Targets</i>	20
2.2 Dampak Kebijakan <i>War on Drugs</i>	23
2.2.1 Domestik	25
2.2.2 Internasional.....	29
BAB 3 STRATEGI FRAMING KEBIJAKAN WAR ON DRUGS	32
3.1 <i>Marketing Effects</i>	32
3.2 <i>Framing Effects</i>	37
3.3 <i>Media Effects</i>	43
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR SINGKATAN

ICC : *International Criminal Court*

PDEA : *Philippine Drug Enforcement Agency*

DDB : *Dangerous Drugs Board*

HAM : Hak Asasi Manusia

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penerapan Strategi <i>Framing</i> Duterte dalam Kebijakan <i>War on Drugs</i>	49
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Akun Resmi Facebook Duterte	34
Gambar 3.3 Laman Website Media Manila Standard.....	45

ABSTRAK

Beragam respon masyarakat muncul ketika Duterte menetapkan serta menjalankan kebijakan *War on Drugs*. Maraknya respon negatif membuat kesan kebijakan *War on Drugs* ini buruk. Mereka yang tidak setuju melihat dari aspek hak asasi manusia yang dilanggar. Masyarakat pun melakukan penggiringan opini atau *framing* tersendiri sehingga kesan buruk kebijakan *War on Drugs* tersebar di penjuru Filipina bahkan dunia internasional. *International Criminal Court* (ICC) yang mengetahui hal ini melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran situasi yang terjadi. Duterte yang mengetahui hal tersebut tentu saja tidak terima dan tidak memberikan akses untuk penyelidikan. Hingga keputusan Duterte dengan Filipina keluar dari *International Criminal Court* (ICC) agar kebijakan *War on Drugs* tetap berlanjut tanpa intervensi siapapun. Upaya *framing* juga telah dilakukan Duterte bersama rezim pemerintahannya. Sisi positif yang terlihat dengan fakta berkurangnya jumlah sindikat narkoba serta kriminalitas di zaman Presiden Duterte daripada presiden - presiden sebelumnya. Pencapaian ini merupakan perubahan yang sangat bagus untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan di kehidupan masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkan bisa menarik perhatian masyarakat untuk mendukung kebijakan Duterte khususnya mengenai kebijakan *War on Drugs*.

Kata-kata kunci: Duterte, *War on Drugs*, *Framing*, ICC

ABSTRACT

Various public responses emerged when Duterte established and implemented the *War on Drugs* policy. The rise of negative responses gives the impression that the *War on Drugs* policy is bad. Those who disagree see the aspect of human rights being violated. The public also carried out their own opinions or framing so that the bad impression of the *War on Drugs* policy spread throughout the Philippines and even internationally. The *International Criminal Court* (ICC), who was aware of this, carried out an investigation to reveal the truth of the situation that occurred. Duterte, who knew about this, of course did not accept it and did not provide access for the investigation. Until Duterte and the Philippines decided to leave the *International Criminal Court* (ICC), the *War on Drugs* policy continued without anyone's intervention. *Framing* efforts have also been carried out by Duterte and his government regime. The positive side can be seen from the fact that the number of drug syndicates and crime has decreased under President Duterte compared to previous presidents. This achievement is a very good change to ensure prosperity and security in people's lives. It is hoped that this will attract public attention to support Duterte's policies, especially regarding the *War on Drugs* policy.

Keywords: Duterte, *War on Drugs*, *Framing*, ICC

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba memiliki pengertian sebagai suatu zat apabila dihirup, dihisap, disuntik, diminum, dan ditelan mempengaruhi manusia pada kinerja otak dengan gangguan kesehatan pada fisik, psikologis, dan fungsi sosial yang terdapat zat berupa ketergantungan dan kecanduan. Berdasarkan jenisnya narkoba menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, dan perilaku (Martonodan Joewana, 2008). Penyebaran narkoba dilakukan melalui penyelundupan yang dimulai dari perbatasan - perbatasan terdekat. Jalur yang digunakan melalui laut dikarenakan lebih aman serta akses yang tidak ketat daripada lewat udara. Seperti melewati pelabuhan selatan Myanmar menuju selatan Thailand, pelabuhan Malaysia, pelabuhan Indonesia, selatan wilayah Tagalog dan tengah wilayah Luzon yang berdekatan dengan metropolitan di Manila. Melalui jalur laut tersebut banyak penyelundupan narkoba yang berhasil lolos tanpa halangan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jumlah besar. Keuntungan yang didapatkan tentu saja untuk kepentingan bisnis oknum, sedangkan konsumen merasakan dampak buruk dari narkoba yang digunakan.

Banyaknya celah dari jalur perdagangan yang bisa dimanfaatkan membuat Filipina juga dijadikan tempat transit untuk pengiriman narkoba ke negara lain. Identifikasi narkoba yang digunakan di Filipina lebih spesifik berupa sabu - sabu dan ganja. Rata - rata pengguna tersebut berada pada rentang usia 15 - 64 tahun.

Perekonomian serta pendidikan yang tidak merata di Filipina menjadi penyebab beberapa orang menjadi pelaku pengedaran narkoba dan konsumen. Pada tahun 2015 - 2016 kriminalitas di Filipina mengalami peningkatan seperti kasus pemerkosaan, pemerasan, kekerasan, dan lain – lain. Tetapi 50% dari kasus tersebut berhubungan dengan narkoba (R.C. Marquez, 2015). Banyaknya masyarakat yang terlibat dalam sindikat narkoba baik yang menjual atau konsumen memberikan kesadaran pemerintah untuk segera bertindak. Akhirnya harapan masyarakat lainnya untuk merubah Filipina menjadi lebih baik itu ada. Hal tersebut dibuktikan ketika Rodrigo Duterte resmi terpilih menjadi presiden pada 30 Juni 2016.

Pengalaman yang dimiliki Duterte sebagai pemimpin sudah ada ketika dahulu menjadi walikota Davao selama 22 tahun. Kepribadiannya dikenal sebagai orang yang arogan dan otoriter. Berbagai keputusan yang dibuat selalu kontroversial. Contohnya saja ketika menjabat sebagai walikota, Duterte sendiri langsung membentuk pasukan khusus untuk memberantas kejahatan dengan sebutan *Davao Death Squad* (Bintoro, 2022). Ketika resmi terpilih menjadi presiden, Duterte langsung melaksanakan janji kampanyenya dengan kebijakan perang narkoba atau *War on Drugs*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah maraknya kasus narkoba yang terjadi di Filipina. Wewenang yang diberikan Presiden Duterte kepada kepolisian untuk memerangi para pelaku dikenal dengan 2 operasi yaitu *Oplan Tokhang* lebih bersifat persuasif dengan pihak kepolisian mengetuk rumah tersangka pengedar atau pecandu narkoba untuk membujuk agar mereka menyerah dan menghentikan kegiatan ilegal (Caliwa, 2019). Sedangkan *Oplan High Value Targets*

membutuhkan banyak bantuan kepolisian karena ditargetkan untuk menangkap para pelaku mafia yang memiliki jaringan kartel luas dengan nama besar.

Ketegasan rezim Duterte dalam memberantas penggunaan narkoba di Filipina juga ditunjukkan dengan keluarnya Filipina dari keanggotaan ICC. Pengadilan pidana internasional independen serta permanen di dunia dikenal sebagai *International Criminal Court*. Dibentuknya ICC bertujuan untuk memberikan keadilan berupa hukuman bagi oknum kejahatan di lingkup internasional. Pada tanggal 17 Juli 1988 di Roma, Italia, menjadi awal mula terbentuknya ICC dengan mengadopsi Statuta Roma. Keanggotaan ICC terdiri dari seluruh masyarakat yang meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court, 2002). Filipina menyandang status resmi sebagai anggota ICC tanggal 30 Agustus 2011. Permasalahan di Filipina dengan adanya indikasi pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penerapan kebijakan *War on Drugs* yang terjadi pada tahun 2018, terhitung 7 tahun setelah diresmikannya Filipina menjadi anggota ICC pada tahun 2011. Data resmi pemerintah Filipina dari awal kebijakan *War on Drugs* sampai 30 September 2018 terdapat korban jiwa kurang lebih mencapai 4948 orang (Roth, 2018). Keputusan Filipina untuk keluar dari ICC juga didorong oleh adanya indikasi kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penerapan kebijakan *War on Drugs* oleh pemerintah Filipina pada tahun 2018. Pada bulan Februari 2018 seorang jaksa penuntut bernama Fatou Bensouda dari dewan ICC mengumpulkan informasi akurat mengenai pemerintahan Duterte dalam menjalankan kebijakan *War on Drugs* yang menyebabkan banyak

korban jiwa. ICC juga memutuskan untuk melakukan investigasi ke Filipina secara langsung meskipun rencana ini kemudian ditolak oleh Filipina.

Lebih lanjut, Presiden Duterte juga memerintahkan seluruh rezim pemerintahan dan aparat kepolisian untuk menolak kerja sama dengan ICC (Martin, 2019). Presiden Duterte merasa ICC tidak berhak ikut campur karena setiap negara memiliki kepentingan nasional sendiri dan masyarakat yang setuju dengan kebijakan *War on Drugs* hidupnya lebih tenang. Presiden Duterte menyatakan Filipina akan mencabut ratifikasi Statuta Roma secepatnya (Utomo, 2018). Pertimbangan yang dilakukan karena keanggotaan dalam ICC dianggap menjadi salah satu halangan bagi pemerintah Filipina untuk secara maksimal menerapkan kebijakan *War on Drugs*. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Maret 2018 Filipina menyampaikan kepada pers dan PBB terkait keputusannya untuk keluar dari keanggotaan ICC. Namun, sesuai peraturan yang tercantum dalam Statuta Roma pasal 127 (1), penarikan diri dari anggota mulai berlaku setelah satu tahun pemberitahuan kepada sekretaris Jenderal PBB sehingga Filipina baru dinyatakan resmi mengundurkan diri dari ICC pada 17 Maret 2019.

Terlepas dari tanggapan negatif terhadap *War on Drugs* baik di dalam negeri maupun internasional, kebijakan tersebut juga ternyata mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dan komunitas di Filipina, seperti komunitas pendukung Duterte dan komunitas anti narkoba (Philippine National Police, 2016). Selain itu, beberapa masyarakat menengah serta masyarakat kelas atas percaya terhadap kinerja Duterte untuk mencegah narkoba agar terjamin keamanan dari kriminalitas dan narkoba

(Mogato, 2017). Komunitas masyarakat yang merasakan dampak positif dari kebijakan *War on Drugs* beranggapan bahwa tingkat kriminalitas kejahatan serta sindikat narkoba baik dari penjual serta konsumen semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang penjelasan diatas, hal ini tentu menarik untuk diteliti mengingat *War on Drugs* seringkali dianggap sebagai kebijakan yang melanggar HAM karena banyak korban jiwa yang ditimbulkan karena target pelaku yang tidak tepat sasaran atau korban lain yang sebenarnya tidak bersalah. Opini masyarakat yang setuju dengan *War on Drugs* pun menjadi tidak terlihat karena *framing* negatif atas kebijakan tersebut lebih gencar dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggali strategi dan upaya *framing* yang dilakukan oleh pemerintah Duterte dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat Filipina untuk menjalankan kebijakan *War on Drugs*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *framing* Duterte terhadap kebijakan *War on Drugs* tahun 2016 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya *framing* Duterte terhadap kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui jalannya proses kebijakan *War on Drugs*.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini dimulai dengan kebijakan *War on Drugs* yang terjadi di Filipina. Karakteristik Duterte sendiri memiliki kepribadian nasionalisme tinggi sehingga rela mengorbankan apapun untuk melindungi negaranya. Keikutsertaan dalam ICC seharusnya menjadikan Filipina patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam perjanjian Statuta Roma. Namun, karena ICC menginvestigasi Filipina, Duterte memutuskan kebijakan lain atas dasar kepentingan nasional. Alasan penulis memilih penelitian tahun 2016 - 2022 dikarenakan pada saat itu sesuai dengan masa jabatan Duterte sebagai Presiden Filipina. Kebijakan *War on Drugs* tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Maraknya penggiringan opini memberi kesan seolah-olah kebijakan Duterte tidak benar, padahal itu hanya suatu strategi yang harus diteliti lebih dalam lagi agar membuktikan seperti apa kejadian yang sebenarnya terjadi. Audiens dari studi kasus memiliki konteks cakupan yang luas meliputi 3 hal yaitu pembahasan mengenai *framing* kebijakan *War on Drugs*, respon masyarakat Filipina, dan ICC.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penulis melanjutkan analisis permasalahan dari acuan penelitian sebelumnya. Hal ini tentu saja berguna dalam mengumpulkan informasi sebagai rujukan dalam perbandingan penelitian dengan topik *framing* kebijakan yang dilakukan Duterte dan Filipina keluar dari ICC.

Menurut jurnal penelitian Hafizh Swardana Suryo Bintoro dengan judul *Analisis Kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam Memimpin Negara Filipina* pada

tahun 2022 didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang dari Duterte yang dikenal berprofesi sebagai pengacara dan politisi. Duterte memiliki pengalaman mengesankan dengan menjadi walikota Davao yang berhasil dengan kebijakan untuk melawan kejahatan. Dibalik kontroversial kebijakan serta watak arogan dan otoriter dari Duterte justru menjadi ciri khas bukti ketegasan terhadap rasa nasionalisme yang dimiliki. Kepribadian Duterte tersebut juga menjadi faktor beberapa masyarakat bersimpati sehingga menaruh harapan besar kepadanya untuk menjadi presiden dengan tujuan melawan kejahatan narkoba yang marak di Filipina. Meskipun pada akhirnya beberapa masyarakat juga mulai tidak bersimpati kepada Duterte karena upaya untuk melawan narkoba yang diterapkan mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM) (Bintoro, 2022).

Menurut jurnal penelitian Gabriel Mallatang Sianturi dan Anak Agung Sri Utari dengan judul *Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif Hukum Internasional* pada tahun 2021 menjelaskan mengenai masyarakat Filipina yang tidak mendapatkan HAM dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan Duterte justru menyebabkan banyak korban jiwa dengan adanya hukuman mati. Hukuman tembak mati tanpa proses peradilan mencederai HAM seseorang (Sianturi dan Utari, 2021). Banyaknya kekerasan yang dilakukan polisi dengan wewenang yang dimiliki justru membunuh masyarakat lain termasuk tuduhan kepada masyarakat yang tidak bersalah. Seharusnya bagi masyarakat yang memang bersalah tetap memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan agar bisa pulih sehat kembali dengan terlebih dahulu melakukan rehabilitasi atau penjara.

Dengan begitu keadilan HAM dirasakan oleh semua individu.

Menurut jurnal penelitian dari Reyes dan Danilo Andres dengan judul *The Spectacle of Violence in Duterte "War on Drugs"* pada tahun 2016 membahas tentang posisi penjahat yang dijadikan target sah pembunuhan dan diperlakukan seperti bukan warga negaranya. Penjahat narkoba diibaratkan tidak berguna sehingga perlu dimusnahkan. Duterte mengizinkan aparat kepolisian untuk membunuh sindikat narkoba serta tidak mendapatkan perlindungan negara. Keadaan pengecualian untuk warga negara dengan suatu alasan tidak dapat terintegrasi dalam sistem politik karena perlindungan negaranya ditolak (Agamben, 2005). Penjahat dipermalukan di depan umum dengan diumumkan melalui radio dan berita, kemudian dibunuh di tempat sehingga menjadi tontonan kekerasan untuk masyarakat. Perlakuan tersebut menjadi simbol intimidasi agar warga negara yang taat merasa aman dan tidak melakukan hal buruk serupa.

Terakhir, menurut jurnal penelitian lain dari Brenda Jacobs, Lucia Charlota Octovina Tahamata, dan Dyah Ridhul Airin Daties dengan judul *Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* pada tahun 2021 membahas mengenai aturan hak asasi manusia yang seharusnya diterapkan Presiden Duterte. Kebijakan yang ditetapkan terkait *War on Drugs* tidak sesuai dengan perjanjian internasional dan aturan hukum di dalam Filipina. Duterte sebagai presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi mengabaikan dasar hukum yang sebelumnya berlaku tentang komitmen HAM. Kewenangan negara dalam mengatur diwujudkan dengan

berlakunya di suatu negara, baik lingkup nasional atau internasional, kedua bidang tersebut tidak bisa dipisahkan. Keduanya melengkapi tetapi saling benturan (Effendi, 2014).

Penelitian - penelitian sebelumnya telah berhasil memberikan gambaran mengenai latar belakang Duterte, beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan HAM, posisi oknum narkoba sebagai target pembunuhan, dan aturan HAM yang seharusnya dilakukan Duterte. Akan tetapi belum ada yang spesifik membahas mengenai opini publik yang mendukung kebijakan Duterte. Sehingga penelitian berikut akan membahas mengenai strategi *framing* Duterte terhadap adanya kebijakan *War on Drugs*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep penulis yang digunakan dalam menganalisis yaitu konsep *Framing, Marketing, and Media Effects on Foreign Policy Decision Making*. Konsep tersebut dijelaskan dalam buku berjudul "*Understanding Foreign Policy Decision Making*" (Mintz & DeRouen, 2010). Setiap pemimpin negara memiliki suatu taktik untuk bisa mengenalkan kebijakan yang telah ditentukan. Salah satu taktik yang digunakan dengan cara *framing* yaitu menyusun informasi dari suatu peristiwa dengan tujuan untuk membentuk opini baru serta menggiring tanggapan publik secara halus agar menciptakan citra atau kesan baru dari yang disampaikan. Semakin bagus informasi yang dikemas tentu menarik media untuk dijadikan bahan berita.

Kegunaan *framing* bisa digunakan sebagai lensa politik. Identifikasi yang dilakukan bermanfaat dengan memberikan dua fungsi. Fungsi tematik melibatkan

isi dari dimensi dan tema yang diorganisir pada penilaian, persepsi, dan interpretasi pada situasi. Hal ini mempengaruhi dimensi dalam prioritas dalam pembuatan keputusan, persetujuan, dan penentangan. Sedangkan fungsi evaluatif memiliki perbedaan. Bingkai yang mewarnai evaluatif dari situasi pembuat keputusan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perbandingan di lingkungan eksternal. Dengan begitu memandang realitas yang terjadi dari situasi lebih terjamin berjalan baik atau tidak.

Menurut Mintz dan DeRouen konsep dalam pembuatan kebijakan yang digunakan terbagi dalam 3 aspek yaitu:

1. *Marketing Effects*

Strategi yang digunakan pemimpin dengan menciptakan atau menampilkan suatu situasi dengan solusi dalam bentuk kebijakan. Dalam melakukan strateginya pemimpin melibatkan bantuan dari orang-orang yang dibentuk, pihak lain, atau tim kampanye yang memberikan arahan untuk merumuskan solusi yang tepat dari situasi yang terjadi. Dengan mengetahui keluhan kesah dari permasalahan yang dialami masyarakat kemudian diberikan solusi yang tepat oleh pemimpin bisa menjadi faktor penting dalam mendapat dukungan masyarakat. Pemimpin bukan pengamat pasif dari modal politik untuk menghindari kerugian dengan cara ekspektasi publik yang harus terpenuhi (DeRouen, 2001).

2. *Framing Effects*

Framing atau pembedaan menggambarkan ketika pemimpin menyampaikan penyajian pesan informasi kepada masyarakat yang pesan dari informasi yang disampaikan dipengaruhi oleh cara penyajian

yang menyesuaikan target yang ingin dicapai. Dalam upayanya yang melibatkan *gain framing* yaitu menjadikan seorang pemimpin sebagai seorang yang baik sehingga penyampaian informasi dari kebijakan yang ditetapkan itu benar. Strategi yang diterapkan juga masuk kategori strategi *set the agenda and the reference point* yang mana kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat itu dijadikan agenda dan referensi prioritas utama dalam kepentingan nasional negara. Pembingkaiian keuntungan bisa menyebabkan aktor terhindar dari risiko, sedangkan pembingkaiian kerugian bisa memicu pada berbagai pilihan yang beresiko. Penggunaan pembingkaiian bisa digunakan secara efektif untuk menyoroti suatu situasi seperti ancaman dan dimensi yang lain.

3. *Media Effects*

Keterlibatan rezim pemerintahan suatu pemimpin dalam melakukan pemberitaan dengan menjelaskan sisi positif suatu kebijakan melalui media masuk pada kategori *manufacturing consent*. Adanya kemajuan teknologi memungkinkan media dalam memberitakan suatu informasi tidak memperhatikan unsur kerahasiaan diplomatik. Kemampuan media dalam melakukan pemberitaan mempengaruhi kebijakan, apabila liputannya semakin besar maka dampaknya terhadap masyarakat juga semakin besar. Proses terbentuk serta berjalannya kebijakan memiliki pengaruh timbal balik dengan media baik secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh timbal balik sebanding dengan situasi seperti kelayakan berita dari sudut pandang pembuat kebijakan dan sudut pandang media.

Dengan adanya 3 aspek tersebut keputusan pemimpin dalam pengambilan keputusan mencoba mengidentifikasi dari pengalaman sebelumnya yang telah dilakukan sebagai acuan perbandingan dengan situasi terbaru. *Marketing Effects* dan *Framing Effects* dilakukan dalam kebijakan luar negeri (khususnya di situasi ambigu) karena publik memiliki informasi dan pengetahuan terbatas tentang krisis. *Media Effects* bisa berupa pengganda kekuatan, pengaturan agenda, dan penghambat ancaman. Strategi tepat yang dilakukan pemimpin dalam mengenalkan kebijakannya melalui bantuan media seharusnya mendapatkan dukungan dari masyarakat, jika itu tidak tercapai maka akan ditentang dan menghambat kebijakan yang akan dilakukan pemimpin.

Dalam hal ini penulis skripsi menganalisis sesuai penerapan yang ada dalam *Marketing Effects*, *Framing Effects*, dan *Media Effects*. Mengingat 3 aspek tersebut sangat berkaitan dalam strategi *framing* yang terjadi pada masa Duterte dalam adanya kebijakan *War on Drugs*. Termasuk terkait upaya yang dilakukan dalam tahapan mengenalkan suatu peristiwa menjadi sebuah berita atau *framing* di media. Upaya yang dilakukan Duterte selaku Presiden Filipina dengan kekuasaan yang dimiliki menginstruksikan media untuk memberitakan hal - hal baik dari kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan. Bahkan kebijakan tegas Duterte beserta rezimnya ketika menemukan beberapa pihak yang membangkang langsung mencabut izin secara paksa kegiatan kerja media atau liputan yang dilakukan.

1.7 Argumen Sementara

Keberhasilan Duterte dalam mengatasi maraknya narkoba ketika menjabat walikota Davao dijadikan acuan dalam kebijakan baru ketika mencalonkan menjadi presiden Filipina. Barulah ketika terpilih menjadi presiden dengan situasi di Filipina darurat narkoba, Duterte kembali melanjutkan kebijakan *War on Drugs* dengan sistem yang lebih ketat dari sebelumnya. Upaya *framing* yang dilakukan Duterte menginstruksikan media untuk memberitakan dampak positif dari kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan. Beberapa media tidak melakukan hal tersebut, justru sebaliknya dengan memberitakan dampak negatif seperti pelanggaran HAM yang terjadi. Beragam respon masyarakat menjadikan kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan tidak optimal karena *framing* yang disampaikan kepada masyarakat banyak yang tidak setuju. Tapi di sisi lain *framing* tersebut juga berhasil mempertahankan beberapa masyarakat yang setuju dengan kebijakan *War on Drugs*. Masyarakat yang setuju mayoritas dari strata kelas sosial menengah sampai tinggi, sedangkan untuk masyarakat yang tidak setuju mayoritas dari strata kelas sosial bawah, lembaga serta organisasi yang berkaitan dengan HAM.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi literatur mengumpulkan data serta analisis sesuai subjek dan objek yang akan diteliti. Diharapkan dengan pemilihan kualitatif memudahkan peneliti dalam memahami konteks permasalahan yang akan dibahas dan menghasilkan analisis

yang lebih efisien. Sedangkan deskriptif yang dimaksud lebih kepada apa yang akan dijelaskan dalam penelitian sesuai situasi yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang dibahas yaitu rezim pemerintahan Duterte. Sedangkan objek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu strategi *framing War on Drugs* tahun 2016 - 2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian dengan mengumpulkan data dari sumber internet dan sumber studi literatur dokumen. Penelusuran melalui sumber referensi resmi dari website serta kajian pustaka seperti jurnal, buku, dokumen resmi, dan data - data yang dibutuhkan lainnya. Data tersebut bertujuan untuk memperkuat argumen peneliti dari berbagai informasi yang telah didapatkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dimulai dengan mengumpulkan data melalui sumber literatur. Penelitian dilanjutkan dengan analisis konsep kerangka teori yang akan digunakan, dan terakhir peneliti dengan informasi akurat yang dimiliki mengerjakan skripsi dengan kualitatif deskriptif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembagian dalam penelitian ini terdiri dari empat bab untuk mempermudah memahami apa yang akan dibahas. Setiap bab tersebut terdiri dari poin - poin sub bab yang berkaitan dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pertama membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bagian bab kedua membahas mengenai kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan di Filipina serta dampaknya baik di lingkup domestik Filipina atau dunia internasional melalui *International Criminal Court*.

BAB III ANALISIS

Pada bagian bab ketiga membahas mengenai implementasi teori dengan upaya strategi *framing* Duterte terhadap kebijakan *War on Drugs*.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab keempat membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran dari seluruh pembahasan dengan memberikan rekomendasi.

BAB 2

KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DUTERTE SERTA DAMPAKNYA DI LEVEL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Dalam pembahasan bab 2 berfokus pada analisis Filipina terhadap narkoba serta kriminalitas, kebijakan *War on Drugs* Duterte pada tahun 2016 - 2022, dan dampak kebijakan dalam lingkup domestik dan internasional. Bab 2 menjadi awal uraian data konteks sebagai dasar pembahasan dalam bab 3 yang berfokus mengenai implementasi *framing* sesuai konsep Mintz & DeRouen.

2.1 Narkoba di Filipina dan Kebijakan *War on Drugs*

Salah satu kawasan di Asia Tenggara yaitu Filipina merupakan negara yang memiliki peredaran narkoba yang cukup tinggi (Salasmita, 2022). Aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan peredaran obat dan konsumen yang menggunakan narkoba. Hal ini disebabkan wilayah Asia Tenggara memiliki letak strategis yang didukung wilayah bersebelahan dengan banyak negara berkembang di sekitarnya. Arus perdagangan yang didukung teknologi canggih serta kecerdikan oknum mempermudah narkoba bisa lolos perbatasan negara hingga masuk ke Filipina. Berbagai jenis narkoba beredar di Filipina mulai dari kokain, morfin, heroin, opium, dan ganja. Jumlah besar terlihat dari penyelundupan narkoba 0,022 kg jenis heroin dan 1.429.474 kg jenis ganja (Prayuda, 2020). Menurut PDEA data para pengguna narkoba pada tahun 2016 berjumlah 1,8 juta, sedangkan menurut DDB mencapai 1,7 juta. Penyebab utama dikarenakan kemiskinan sehingga masyarakat

terdampak mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkan perekonomian, selain itu terdapat penerapan hukum yang kurang tegas sehingga berdampak pada anggapan remeh masyarakat yang menggunakan narkoba secara bebas. Hal tersebut tentu saja mengkhawatirkan karena berpengaruh terhadap masyarakat Filipina dengan merusak pendidikan, gangguan kesehatan, dan menimbulkan kejahatan lainnya.

Menurut laporan *United Nations World Report of Drug* mengenai narkoba di Filipina pada tahun 2009 menjadi produsen sabu dan ganja terbesar kelima di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Untuk mendukung keberhasilan produsen yang dilakukan para sindikat narkoba ikut berperan dalam perdagangan narkoba ilegal yang selanjutnya dikirim ke wilayah lokal di Filipina serta dikirim ke negara lain. Tidak jarang para sindikat narkoba ditangkap di negara lain ketika membawa atau mengekspor narkoba tersebut. Narkoba yang dibawa biasanya berasal dari negara China, Korea, dan Jepang, yang kemudian ada beberapa yang ditanam kembali di Filipina dalam laboratorium atau lapangan yang dimiliki oknum. Di Filipina dengan mudahnya bisa mengekspor narkoba dikarenakan faktor geografis yang dimiliki. Banyaknya pulau yang terdiri lebih dari 7.000 serta panjang garis pantai 36.200 km. Pantai disana juga banyak yang tidak berpenghuni dan tidak ada penjagaan. Tentu saja hal tersebut dimanfaatkan para sindikat narkoba dalam menjalankan aksinya. Pihak keamanan nasional Filipina juga kesulitan dalam memantau maraknya peredaran narkoba yang terjadi (United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law, 2010).

2.1.1 Upaya untuk Mengatasi Masalah Narkoba

Sebenarnya sudah sejak lama permasalahan narkoba ini terjadi. Pemerintah sebelumnya pun telah berupaya untuk menciptakan kebijakan berupa regulasi untuk meminimalisir permasalahan narkoba yang ada di Filipina. Pada tanggal 23 Januari 2002 pemerintah mengamandemen Republic Act 9165 dari isi sebelumnya yang tercantum di Republic Act 6425 untuk memperbarui landasan yang berkaitan terhadap penanganan narkoba. Upaya yang dilakukan pemerintah sebelumnya dengan membentuk suatu dewan khusus yang bertujuan untuk mengontrol operasi narkoba di Filipina yaitu *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)* dan *Dangerous Drugs Board (DDB)* (International Narcotics Control Strategy Report, 2015).

A. *Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)*

Dibentuknya dewan khusus yang menjadi kelembagaan untuk menjadi poros utama dalam melakukan tindakan penyelidikan serta operasi untuk menegakkan anti narkoba. Sesuai dengan Republic Act 9165 perkembangan yang diupayakan untuk mencapai tujuan dalam tindakan khusus lapangan dalam memberantas narkoba. Terdapat tanggung jawab lain dari PDEA sebagai pemegang kendali serta bertanggung jawab terhadap kebijakan serta undang - undang yang disetujui DDB agar berjalan efektif dan efisien.

Wujud tanggung jawab PDEA terhadap kebijakan serta undang - undang dari DDB dengan membentuk sekaligus memimpin tim investigasi dalam operasi pemberantasan narkoba. Contohnya ketika PDEA membentuk *Airport Inter-Agency Drug Interdiction Task Group*

(AIADITG). Tim investigasi tersebut terdiri dari pihak Bea Cukai Filipina, pihak Imigrasi Filipina, dan Polisi Nasional Filipina. AIADITG berfokus untuk mengamankan wilayah bandara dengan melakukan pemeriksaan barang - barang dari penyelundupan narkoba. Itu sebagai tanggung jawab PDEA sebagai fasilitator tindakan operasi pemberantasan narkoba di Filipina.

B. Dangerous Drugs Board (DDB)

Dibentuknya dewan khusus sesuai *The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* untuk menangani permasalahan narkoba. Posisi DDB sendiri di bawah naungan presiden langsung sehingga tugasnya berfokus untuk menciptakan strategi serta kebijakan untuk mengendalikan upaya pemberantasan narkoba. Tanggung jawab DDB meliputi koordinasi, regulasi, pendidikan pencegahan, penegakan hukum utama, perawatan rehabilitasi, dan hal - hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan narkoba yang terjadi di Filipina.

Keanggotaan DDB terdiri dari gabungan berbagai entitas pemerintah, swasta, dan lembaga. Dengan begitu pemerintah melalui DDB menunjukkan upaya pendekatan holistic atau melibatkan berbagai pihak untuk bisa memberantas permasalahan narkoba. Terdapat program penting yaitu sosialisasi pencegahan, pengembangan, serta pengobatan agar bisa mengedukasi masyarakat untuk menjauhi narkoba yang dampaknya merusak gangguan jiwa dan otak masyarakat. Selain itu, DDB menginspirasi adanya kerjasama regional dan internasional untuk mengoptimalkan upaya terbaik dalam pemberantasan narkoba

melalui penyebaran wawasan informasi, program regulasi, dan pendidikan pencegahan (International Narcotics Control Strategy Report, 2015).

Kebijakan regulasi sebelumnya yang ditetapkan di Filipina belum bisa berjalan optimal sehingga permasalahan narkoba masih sering terjadi, ditambah dengan adanya kriminalitas seperti pemerkosaan, penipuan, dan perampokan. Maka dari itu diperlukan inisiatif seperti yang dilakukan Duterte ketika pencalonan presiden. Kampanye yang dilakukan menekankan 3 aspek yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan memberantas narkoba, mencegah kriminalitas, dan minimnya kemiskinan. Ketika resmi menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte melaksanakan prioritas salah satu janji kampanyenya untuk memerangi narkoba di Filipina dengan ditetapkannya kebijakan *War on Drugs*. Agar kebijakan tersebut bisa tercapai terdapat 30 pasal yang ditetapkan termasuk *Republic Act 9346*, *Republic Act 3815*, *Republic Act 6539*, *Republic Act 7080*, dan *Republic Act 9165*. Terkhusus menyikapi narkoba Duterte mengaktifkan kembali peraturan dalam *Republic Act 9165* yang mana terdapat revisi mengenai penetapan hukuman bagi para sindikat narkoba dengan seumur hidup di dalam penjara sampai paling berat denda 500.000 sampai 10.000.00 peso serta hukuman mati. Penetapan kebijakan hukuman mati diberlakukan kembali oleh Duterte yang sebelumnya dihapus pada tahun 2006 (The Guardian, 2016).

2.1.2 Penerapan Peraturan *Oplan Tokhang* dan *Oplan High Value Targets*

Kepentingan nasional di masa pemerintahan Duterte berfokus pada implementasi langkah yang lebih efektif dengan kebijakan *War on Drugs* yang bersih dari narkoba. Berbagai kejahatan yang sebelumnya marak terjadi di Filipina

harus diminimalisir agar tidak muncul kejahatan lain. Kejahatan seperti perampokan, pembantaian, dan pemerkosaan mulai meningkat (Ranada, 2016). Ketegasan penegakan hukum juga diupayakan merata di semua kalangan. Duterte memperingatkan sekelas petinggi pejabat pun jika melindungi oknum kejahatan narkoba termasuk bentuk nyata penghalang wibawa pemerintah dan jalannya pembangunan. Inisiatif Duterte bekerjasama dengan kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan operasi *Double Barrel*. Hal ini sesuai dengan *Command Memorandum Circular No. 16 2016*, yang berisi tentang *Philippine National Police Anti Illegal Drugs Campaign Plan "Double Barrel"*. Landasan tersebut berisi surat perintah yang ditandatangani Ronald M Rosa sebagai Kepala Jenderal Kepolisian Filipina dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016. Kewenangan yang dimiliki kepolisian memang lebih bebas untuk memberantas sindikat narkoba dalam kondisi hidup atau mati. Namun, Duterte tetap memberikan pedoman umum, prosedur, dan tugas kepolisian dalam pelaksanaan operasi *Double Barrel* untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba.

Kepolisian Filipina mendapatkan wewenang dari Duterte untuk memberantas sindikat narkoba dalam keadaan mati atau hidup ketika melakukan operasi (Philippines National Police, 2016). Hal ini dilakukan Duterte sebagai bentuk komitmen rasa nasionalisme. Harapan masyarakat Filipina juga besar terhadap Duterte ketika menjadi presiden untuk menjadikan seluruh wilayah di Filipina aman dari narkoba. Bukan hanya khusus wilayah di kota besar seperti Quezon dan Manila, melainkan merata di wilayah kota atau desa lain.

Dalam memberantas permasalahan narkoba kepolisian tidak bekerja sendiri melainkan adanya sinergitas bantuan masyarakat. Surat Department of the Interior and Local Government (DILG) No. 2017-112 menjelaskan pedoman kepada masyarakat Filipina agar berperan aktif membantu kepolisian untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba. Dengan adanya bantuan kooperatif masyarakat diharapkan memudahkan kepolisian untuk menangkap para sindikat narkoba yang masih berkeliaran bebas. Operasi kepolisian *Double Barrel* yang diterapkan di Filipina terbagi dalam 2 langkah, yaitu *Oplan Tokhang* dan *Oplan High Value Targets* (Philippines National Police, 2016).

Oplan Tokhang merupakan kepanjangan dari bahasa Cebuano dengan kata dasar Toktok dan Hangyo yang berarti mengetuk dan permintaan. Tindakan ini berusaha untuk lebih persuasif kepada target individu masyarakat yang berkaitan dengan narkoba baik pengedar atau pengguna dengan strata sosial menengah sampai kebawah. Cara yang dilakukan polisi dengan mengunjungi rumah oknum untuk dibujuk agar menyerahkan diri dengan memberikan info terkait. Jika mereka menolak atau memberikan perlawanan maka polisi mendapatkan izin untuk menembak mati oknum di tempat. Anggapan Duterte bahwa membunuh oknum kriminal bukan kejahatan HAM (Salaverria, 2017).

Oplan High Value Target merupakan penerapan dari komando pemerintah memorandum Filipina No. 16 - 2016 yang menargetkan untuk menetralsir serta menangkap individu yang terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba di Filipina meliputi individu yang bergerak di suatu kelompok dan bandar narkoba (Republic of the Philippine, 2016). Beberapa sindikat narkoba besar yang berhasil ditangkap

dalam *Operasi High Value Target* yaitu The Mexican Sinaloa Drug Cartel, The African Drug Syndicate, dan The Chinese. Dengan menangkap 3 sindikat tersebut memberikan dampak yang baik, karena tiga sindikat berbahaya tersebut memiliki operasional bebas di Filipina dalam mengirimkan narkoba di dalam serta luar negeri (Bintoro, 2022).

2.2 Dampak Kebijakan *War on Drugs*

Perilaku dari kebijakan negara yang ada merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kekuatan suatu negara dengan menjamin kedaulatan negara tersebut diantara negara - negara lain agar terciptanya politik internasional yang seimbang (Suwarman, 2018). Dalam kebijakan yang ditetapkan aktor pemimpin negara memiliki latar belakang dan tujuan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Mengingat kepentingan nasional Filipina pada rezim Duterte dalam situasi darurat, sehingga sangat penting untuk berkomitmen dalam upaya memberantas narkoba serta kriminalitas. Adanya kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan Duterte memberikan pengaruh legitimasi kepada masyarakat Filipina dalam skala domestik dan internasional. Legitimasi dalam hal ini memberikan penerimaan atau penolakan masyarakat dengan adanya otoritas kebijakan yang ditetapkan. Respon masyarakat terkait adanya kebijakan *War on Drugs* pun beragam sehingga kestabilan pemerintah yang diharapkan menjadi terkendala. Pendapat pro dan kontra yang ramai di masyarakat meskipun sempat menghambat, pada akhirnya tetap dilanjutkan oleh pemerintah rezim Duterte pada bulan Juli 2016 - Juni 2022 ketika masa jabatannya selesai.

Kebijakan *War on Drugs* memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Filipina. Efeknya pun bukan hanya dalam lingkungan domestik melainkan juga internasional. Dalam lingkungan domestik terlihat dari beragamnya masyarakat yang pro dan kontra dengan kebijakan *War on Drugs*. Masyarakat pro berpendapat bahwa langkah ini sudah tepat untuk memberantas narkoba. Itu terlihat dengan banyaknya sindikat narkoba yang tertangkap dan peredaran narkoba yang mulai berkurang. Di sisi lain bagi masyarakat kontra berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan Duterte tidak berempati atas dasar HAM sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang terbunuh. Kebijakan *War on Drugs* memberikan dampak positif dengan menurunnya tingkat narkoba serta kriminalitas, tetapi dampak buruknya orang - orang bisa membunuh sesukanya dan orang - orang menjadi korban pembunuhan. Dalam lingkungan internasional karena respon masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini banyak disuarakan sehingga beritanya menyebar ke beberapa negara lain. ICC yang mengetahui berita tersebut segera mengumpulkan data dan melakukan investigasi. Duterte yang tidak terima akan perlakuan tersebut memutuskan bahwa Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Karakteristik Duterte memang terkenal sangat otoriter. Kekuasaan yang dimiliki tidak ada yang bisa mengganggu, meskipun dari hukum internasional (Sri Wahyuni, 2022).

Ketegasan yang diterapkan dalam kebijakan *War on Drugs* yang awalnya membuat masyarakat takut serta trauma dengan maraknya kriminalitas serta peredaran narkoba yang ada, menjadikan mereka percaya terhadap apa yang dilakukan negara. Tidak dapat dipungkiri kekerasan dalam ketegasan penerapan kebijakan *War on Drugs* oleh negara sesuai perintah Duterte

menyebabkan berkurangnya permasalahan utama yang terjadi di Filipina. Masyarakat merasakan perbedaan dengan keamanan yang lebih terjamin. Kebijakan tersebut memberikan dampak nyata dalam berkurangnya persentase kriminalitas serta peredaran narkoba. Tujuannya untuk tercapainya kepentingan nasional yang memberikan keamanan bagi masyarakat agar lebih terjaga dengan memberikan peningkatan keamanan nasional dan perlindungan (Department of Foreign Affairs, 2017). Dengan rasa aman yang dirasakan beberapa masyarakat Filipina menjadi tanda bahwa kebijakan *War on Drugs* yang berfokus pada kepentingan nasional berpengaruh positif sehingga beberapa dari mereka puas karena merasa terlindungi.

2.2.1 Domestik

Pemerintah Filipina dan Duterte percaya bahwasannya dengan adanya kebijakan *War on Drugs* bukan hanya untuk memberantas narkoba, melainkan juga memberikan pengaruh lain terhadap kriminalitas yang terus berkurang seperti perampokan, pemerkosaan, penipuan, dan sindikat narkoba. Data dari *Philippine National Police* (PNP) pada masa jabatan Presiden Filipina Benigno Aquino III bulan Juni 2010 - Juni 2016 indeks kejahatan kriminalitas yang terjadi total mencapai 1.113.712. Sedangkan, pada masa jabatan Presiden Duterte dari bulan Juni 2016 - per Juni 2021 indeks kejahatan yang terjadi hanya sekitar 395.920. Dari data tersebut terlihat indeks kejahatan di masa Pemerintahan Duterte berkurang 64% dari masa Pemerintahan Benigno Aquino III (Pena, 2021). Menurut laporan kantor berita resmi pemerintah yaitu *Philippine News Agency* memberitakan hal yang sama dalam kampanye *War on Drugs* menunjukkan perubahan yang

signifikan dalam permasalahan narkoba dengan 76,01 miliar narkoba telah disita oleh PDEA dan 331.694 individu oknum telah ditangkap (Gita, 2022). Dengan begitu terlihat kebijakan *War on Drugs* berdampak positif dengan berkurangnya permasalahan narkoba serta kriminalitas. Duterte menekankan dalam setiap kebijakannya menerapkan sifat disiplin, termasuk dalam kebijakan *War on Drugs*. Dalam salah satu pidato yang disampaikan Duterte bahwa Filipina bisa menjadi negara maju dan langkah yang dibutuhkan untuk itu dimulai dari kedisiplinan yang dipraktikkan seluruh masyarakat. Maka setiap kebijakan yang diterapkan secara otomatis juga berpengaruh kepada masyarakat untuk patuh dan disiplin. Jika tidak maka akan mendapat konsekuensinya.

Setelah terpilihnya Duterte serta berjalannya kebijakan *War on Drugs* muncul beberapa masyarakat yang menyetujui dengan berpendapat sebelum Duterte menjabat lingkungan rumah masyarakat selalu ramai dengan banyaknya orang - orang yang berkeliaran di jalanan. Sekarang polisi lebih sering berjaga di beberapa pos jalan untuk memantau serta melakukan pemeriksaan sehingga mencegah peristiwa buruk terjadi. Seperti lebih sedikit orang mabuk atau pencurian yang berkeliaran di jalan. Dalam jalannya kebijakan juga pemerintah Filipina dan Duterte memperluas akses dengan kebijakan *real time facial recognition* ke seluruh wilayah (BRI Monitor, 2021). Diharapkan dengan kebijakan tersebut melalui adanya pemasangan cctv di beberapa tempat bisa mempermudah analisis, mengumpulkan data, mengintegrasikan data pemerintah, catatan kriminal, dan sumber lain yang mendukung untuk mengurangi kriminalitas di Filipina.

Duterte menjadi presiden pertama yang memprioritaskan penjahat sebagai target dalam program kerjanya (Reyes, 2016). Didukung ketegasan dalam kebijakan *War on Drugs* yang membuat mereka ditangkap atau dibunuh sehingga mereka tidak bisa beraktivitas banyak di lingkungan luar. Pilihannya bagi mereka harus menyerahkan diri secara kooperatif kepada polisi yang bertugas jika ingin bisa melanjutkan hidup. Masyarakat juga bisa lebih aman untuk beraktivitas serta tidak takut terganggu lagi karena jumlah sindikat narkoba serta oknum kejahatan berkurang dengan bantuan kepolisian.

Situasi dahulu dengan kriminalitas dan sindikat narkoba yang bergerombol seperti itu sekarang berubah dengan masyarakat yang bisa lebih berekspresi bebas di tempat umum dengan segala aktivitasnya. Pelaku kriminalitas dan sindikat narkoba memang takut dengan ketegasan kebijakan yang ditetapkan Duterte. Beberapa masyarakat berharap presiden selanjutnya akan tetap melanjutkan kebijakan ini karena memang terbukti efektif, jika kebijakan ini berhenti akan memberi kesempatan kepada para pelaku kriminalitas dan sindikat narkoba untuk beraksi kembali di Filipina dengan alasan presiden yang baru tidak akan melanjutkan kebijakan ini.

Permasalahan lain dengan adanya kebijakan yang ditetapkan suatu negara pasti terdapat beberapa masyarakat lain yang kontra, seperti dalam hal nya kebijakan *War on Drugs*. Berbagai kritik yang sering diutarakan oleh masyarakat adalah mengenai pelanggaran HAM dalam operasi yang dilakukan. Adanya HAM yang dimiliki setiap individu merupakan kebebasan yang diberikan Tuhan dan pelaksana awal dari HAM adalah pemerintah (Wilujeng, 2013). Menurut beberapa masyarakat, pemerintah Filipina tidak memperhatikan masyarakatnya.

Fokus mereka hanya kepada target dalam pemberantasan narkobanya. Operasi yang dilakukan dengan kepolisian yang bertugas seharusnya melakukan penembakan mati sindikat narkoba jika dalam kondisi terdesak seperti ketika mereka melawan petugas, namun kenyataannya para sindikat narkoba yang telah bersikap kooperatif terhadap polisi tetap ditembak mati. Hal ini tidak sesuai dengan *Art 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* pada tahun 1998. Seharusnya para sindikat narkoba mendapatkan hukuman yang lebih persuasif agar memberikan mereka kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik seperti edukasi, perawatan, rehabilitasi, dan sosialisasi.

Kebijakan Duterte dirasa masyarakat tidak sesuai dengan peraturan HAM dalam perjanjian internasional maupun peraturan hukum konstitusi di Filipina sendiri. Beberapa masyarakat kontra tidak bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di Filipina karena adanya kewenangan Duterte sebagai presiden dan senat yang diberikan tugas konstitusi untuk bersikap (Social Weather Stations, 2018). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* telah menjelaskan bahwasanya hak hidup individu tidak boleh dirampas oleh seorang pun, diperkuat juga dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR “Setiap manusia berhak atas hidupnya. Hukum wajib melindungi hal ini, tidak bisa dirampas seorang pun secara sewenang - wenang”.

Masyarakat juga mengeluhkan dalam operasi kebijakan yang dilakukan ada oknum kepolisian yang bertugas bertindak semena - mena dengan mendatangi target rumah tanpa menunjukkan surat penangkapan resmi dan memperkenalkan diri. Mereka langsung masuk ke rumah target untuk interogasi, bahkan secara tiba - tiba melakukan penembakan ketika di dalam rumah, jarak beberapa menit

setelah keluar rumah, kemudian masyarakat lain akan melihat jasadnya. Keluarga dari target penangkapan hanya bisa berteriak, anggota keluarga menangis, mendengar suara tembakan, dan memohon ampun atas kesalahan target yang padahal belum tentu terbukti dilakukan. Kekecewaan yang dirasakan masyarakat membuat mereka semangat dan berani untuk bersuara melawan kebijakan Duterte. Masyarakat yang melawan terdiri dari anggota keluarga yang terbunuh, masyarakat dengan strata sosial bawah, aktivis, masyarakat sipil, dan kelompok HAM (Ardyan, 2016). Salah satu kelompok HAM *Network Against Killing* (NIK) telah berupaya melawan dengan menuntut pemerintah Filipina atas pelanggaran HAM yang dilakukan untuk bertanggung jawab dengan banyaknya korban jiwa, supremasi hukum, dan kebebasan sipil.

2.2.2 Internasional

Permasalahan yang diangkat dari kebijakan *War on Drugs* mengenai adanya indikasi pelanggaran HAM. Operasi yang dilakukan seharusnya bertujuan untuk memberantas maraknya narkoba di Filipina, dalam praktik yang dilakukan lebih condong dibuktikan dengan adanya *extrajudicial killing*. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diluar keputusan hukum dilarang sesuai ketentuan peraturan undang - undang nasional maupun hukum hak asasi manusia internasional (Heler, 2021). Situasi yang menggambarkan mengapa kebijakan *War on Drugs* masuk kategori *extrajudicial killing* adalah adanya kematian yang terjadi karena gagalnya negara dalam melindungi warga negaranya. Negara melanggar kewajibannya untuk menjamin kebebasan serta hak untuk hidup. Kematian ini

disebabkan aparat penegak hukum atau petugas kepolisian yang melakukan perintah sesuai arahan Duterte. Disisi lain sebenarnya ada tindakan menyeleweng juga dari oknum kepolisian yang bertugas. Hal tersebut berdampak kepada banyaknya korban jiwa dari berbagai wilayah, bahkan ada yang tidak bersalah tetap menjadi korban. Meskipun para sindikat narkoba bersalah seharusnya mereka tetap mendapatkan kesempatan hidup yang sama agar bisa berubah menjadi lebih baik.

Maraknya penggiringan opini yang disuarakan beberapa masyarakat kontra dan disebarluaskan melalui media membuat banyak pihak mengetahui peristiwa dalam kebijakan *War on Drugs* yang terjadi di Filipina. Selain diketahui oleh masyarakat Filipina, beberapa pihak di luar negeri seperti pengadilan hukum internasional juga mengetahuinya. ICC sendiri merupakan pengadilan internasional permanen yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi setiap individu dalam kejahatan internasional yang terlibat sesuai aturan dasar hukum Statuta Roma yang mulai ditetapkan pada 1 Juli 2002. Hak yang dimiliki ICC bisa melakukan penuntutan, pengadilan, dan penyelidikan terhadap permasalahan kejahatan yang ada dalam yurisdiksinya selaku negara yang berpartisipasi menjadi anggota ICC dan meratifikasi Statuta Roma.

ICC menerima banyak laporan mengenai adanya situasi pembunuhan individu di luar peradilan kepada sindikat narkoba di Filipina. Banyaknya korban jiwa dalam operasi yang dilakukan oleh kepolisian yang bertugas. ICC mengumpulkan bukti - bukti konkrit yang dirasa cukup hingga pada 8 Februari 2018 kantor kejaksaan ICC menyampaikan kepada Filipina, kemudian Fatou Bensouda selaku Kepala Jaksa Penuntut Umum ICC pada saat itu menyatakan akan memulai

investigasi “pemeriksaan awal” langsung di Filipina untuk mengetahui pelanggaran kejahatan manusia yang terjadi. Duterte yang mengetahui kabar tersebut sadar bahwa potensi jika investigasi yang dilakukan tersebut berlanjut akan membuat Duterte mendapatkan sanksi berupa diberhentikan dari jabatan presiden, dipenjara, dan kebijakan *War on Drugs* dihentikan. Respond Duterte tidak takut terhadap apapun yang akan dilakukan, malah menantang balik dengan menolak bekerja sama sekalipun dengan ICC (Martin, 2019). Hal tersebut dilakukan Duterte mengingat prioritas Filipina pada saat itu adalah untuk memberantas narkoba dan kriminalitas. Berbagai upaya akan dilakukan Duterte agar otoritas kebijakan *War on Drugs* tetap berlanjut, meskipun harus melibatkan kekerasan.

Perlakuan ICC kepada Duterte seolah-olah dicap sebagai seorang penjahat yang melanggar HAM membuatnya tersinggung. Duterte lelah dengan segala tuduhan yang dilakukan ICC (Novi, 2018). Menurut Duterte tindakan yang dilakukan dalam operasi *War on Drugs* bukan melanggar HAM karena tujuannya jelas sebagai kepentingan nasional Filipina dalam memberantas narkoba dan kriminalitas. Maka dari itu salah satu upaya strategis yang menurut Duterte tepat dengan keluarnya Filipina dari ICC. Dengan upaya tersebut secara otomatis Filipina telah keluar dari keanggotaan serta ICC tidak berhak ikut campur maupun mengganggu kebijakan *War on Drugs*. Duterte menyampaikan kepada pers terkait keluarnya Filipina dari ICC pada 17 Maret 2018, namun sesuai dalam Statuta Roma pasal 127 ayat 1 dan 2 bahwa setiap negara harus menunggu selama satu tahun setelah menyatakan keluar serta mengurus administrasi kepada sekretaris jenderal ICC untuk status negara yang keluar dari ICC.

BAB 3

STRATEGI *FRAMING* KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*

Pada bab 3 merupakan implementasi dalam konsep *Framing, Marketing, and Media Effects on Foreign Policy Decision Making* dalam buku berjudul "*Understanding Foreign Policy Decision Making*". Menurut Mintz dan Derouen selaku penulis buku dengan menggunakan 3 taktik tersebut secara efisien akan semakin mudah menjangkau masyarakat dalam memahami suatu kebijakan yang digunakan pemimpin.

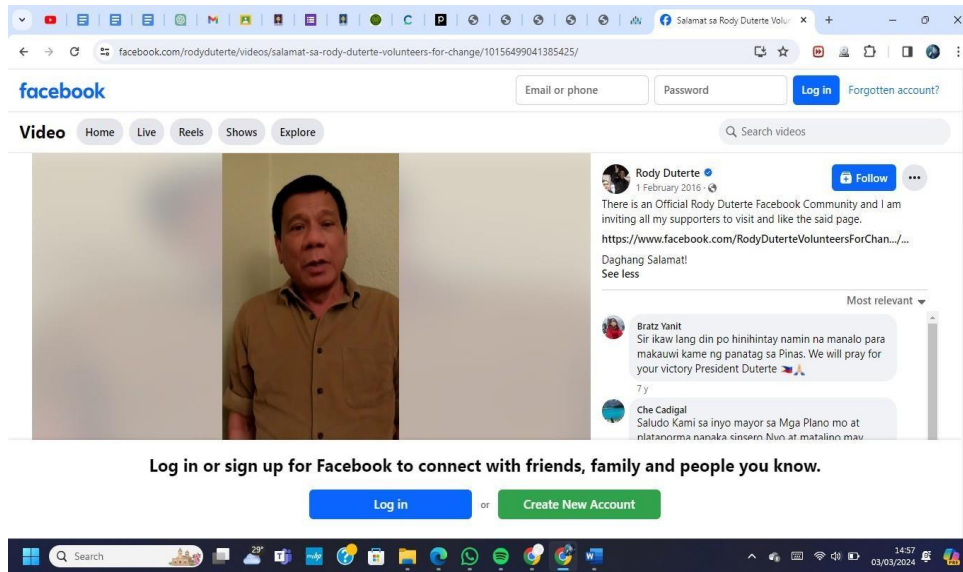
3.1 *Marketing Effects*

Keberhasilan dalam menerapkan *marketing effects* akan memudahkan dalam implementasi kebijakan yang ditetapkan. Dalam meningkatkan dukungan, para pemimpin menyampaikan situasi yang sebenarnya terjadi kepada masyarakat. Disitulah tindakan yang diharapkan dari pemimpin setelah menyampaikan situasi yang terjadi dengan ditemukannya solusi yang bisa diterapkan dalam kebijakan. Masyarakat merasakan dampak kerugian namun tidak bisa bertindak karena tidak punya kuasa. Berbeda dengan pemimpin yang memiliki wewenang kuasa bertindak di negara. Otomatis ketika masyarakat menyadari serta mengetahui ada solusi yang dijanjikan pemimpin serta masuk akal maka masyarakat akan mendukung pemimpin tersebut. Penerapan *marketing effects* yang optimal bukan hanya didasari dari tindakan pemimpin, tapi ada bantuan dari orang - orang yang dibentuk, pihak lain, atau tim kampanye yang memberikan arahan untuk merumuskan solusi

yang tepat dari situasi yang terjadi. Pemimpin bukan pengamat pasif dari modal politik untuk menghindari kerugian dengan cara ekspektasi publik yang harus terpenuhi (DeRouen, 2001).

Penerapan strategi kebijakan *War on Drugs* dalam *marketing effects* juga digunakan Duterte ketika masa kampanye calon presiden pada tahun 2016 dalam mengenalkan atau mempromosikan suatu kebijakan. Kampanye yang dilakukan melalui pernyataan akun resmi facebook Duterte yang diposting tanggal 1 Februari 2016 menarik perhatian banyak kalangan. Dalam video tersebut kampanye yang dilakukan Duterte dengan mengatakan “ *in three to six months to stop our corruption, i will suppress drugs, and drugs must be stopped*”. Upaya kampanye lain yang dilakukan Duterte dengan menyampaikan dalam forum secara langsung ketika orasi untuk memberantas maraknya narkoba dan kriminalitas di Filipina. Salah satu solusi yang diberikan Duterte berupa inisiatif untuk melakukan kebijakan *War on Drugs*. Kebijakan tersebut selalu disebutkan Duterte ketika masa kampanye pada Februari - Mei 2016. Selama proses kampanye untuk menambah dukungan masyarakat, salah satu slogan yang digunakan Duterte adalah *change is coming*. Maksud dari slogan tersebut dengan kebijakan yang dijanjikan akan memberikan efek positif dengan adanya perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Filipina. Rasa optimis Duterte juga bertambah apalagi dengan pengalaman sebelumnya ketika menjadi wali kota Davao yang berhasil menekan jumlah kriminalitas, sehingga masyarakat akan memilih dengan harapan kebijakan yang dijanjikan bisa optimal di seluruh wilayah di Filipina.

Gambar 3.1 Akun Resmi Facebook Duterte



Sumber: (Facebook Duterte, 2016)

Beberapa kebijakan yang dijanjikan Duterte ketika kampanye dalam bidang keamanan:

1. Memberantas Narkoba

Kepentingan nasional Filipina dengan maraknya kasus narkoba menjadi titik fokus Duterte dalam janji kampanye untuk mewujudkan tindakan nyata dalam memberantas narkoba. Jika Duterte terpilih menjadi presiden siapapun yang berkaitan dengan sindikat narkoba akan mendapatkan tindakan tegas yang ringan sampai hukuman terberat dengan dihukum mati agar memberikan efek jera. Rencana Duterte dalam memberantas narkoba di Filipina hampir sama seperti dahulu ketika menjadi wali kota Davao selama 22 tahun, namun dengan sedikit tambahan terkait sistematikanya.

Duterte menyadari keinginannya ini sangat besar sehingga membutuhkan banyak bantuan masyarakat untuk mendukung kebijakannya. Kepolisian juga dilibatkan Duterte untuk turut serta bekerja sama dalam melakukan tindakan di lapangan. Keikutsertaan Duterte dalam kampanye ketika melakukan pembicaraan politik melakukan manuver yang berbeda. Dengan menampilkan bahasa krisis secara terang - terangan berani memberikan gambaran mengenai obat - obatan terlarang sebagai pelopor yang menyebabkan Republik Filipina berada di ambang bencana. Duterte sanggup menyampaikan situasi keprihatinan nyata yang tersembunyi dibalik layar (Nicole 2016). Kecerdikan Duterte dalam melakukan narasi menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa masyarakat jika dibanding narasi kampanye calon presiden lainnya. Keberhasilan narasi tersebut berkaitan dengan kegelisahan yang sudah lama terpendam tapi belum bisa diungkapkan. Permasalahan berulang mengenai obat - obatan terlarang belum pernah terselesaikan dengan baik sehingga berdampak negatif kepada masyarakat. Seperti seorang orang tua yang takut anaknya ikut terjerumus hal - hal buruk termasuk obat - obatan terlarang atau narkoba.

2. Memberantas Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Filipina pada tahun 2016 memiliki statistik 10,64%, mengalami peningkatan 22,9% jika dibanding tahun 2012 (Philippine Crime Rate & Statistic, 2024). Kriminalitas yang terjadi melibatkan harta benda serta orang seperti perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Adanya peningkatan jumlah kriminalitas juga termasuk

dalam ancaman nasional yang dijadikan prioritas utama ketika kampanye. Duterte menegakkan ketegasan hukum agar terciptanya ketertiban. Keinginan Duterte untuk memberlakukan peraturan seperti dahulu yang pernah dilakukan di Davao dengan menetapkan jam malam kepada anak - anak yang terbatas sampai jam 22.00. Kemudian terdapat larangan bagi siapapun yang menjual minuman beralkohol di ruang publik dimulai dari jam 01.00 - 08.00. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tetap aman serta mengurangi resiko dari tindakan kriminalitas lainnya. Dalam janjinya juga dalam 6 bulan pertama masa jabatan bisa menunjukkan berkurangnya kriminalitas secara signifikan.

Strategi *marketing effects* yang dilakukan Duterte berhasil menciptakan ikatan emosional dengan masyarakat yang begitu menguntungkan, Duterte berhasil meyakinkan masyarakat melalui tawaran program serta kebijakan dalam fokus kampanye penekanan isu pemberantasan narkoba dan pemberantasan kriminalitas yang menjadi poin penting dalam menarik dukungan masyarakat untuk memilihnya. Penyelidikan yang dilakukan survei Pulse Asia PB pada bulan April 2016 memperlihatkan dukungan suara Duterte meningkat 10% dibanding calon presiden lainnya (Holmes, 2016). Salah satu faktor peningkatan suara yang terjadi disebabkan penguasaan Duterte ketika melakukan debat kedua di Cebu. Setelah membaca, menonton, dan mendengar debat, beberapa masyarakat berpendapat bahwa debat tersebut mempengaruhi suara pilihan mereka. Adanya kekecewaan masyarakat terhadap presiden sebelumnya menjadi kepercayaan masyarakat untuk menaruh harapan besar kepada Duterte untuk melakukan perubahan yang lebih baik khususnya dalam memberantas narkoba dan kriminalitas. Hal tersebut

terbukti dengan kemenangan Duterte dalam pemilu presiden yang memperoleh 38,5% suara, mengalahkan calon presiden lainnya.

Pada 30 Juni 2016 setelah resmi menjabat presiden, Duterte melakukan pidato kepresidenan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat baik yang memilihnya atau tidak untuk mengetahui prioritas dalam kebijakan yang akan ditentukan. Isi pidato Duterte berfokus kepada kriminalitas, penjelasan dampak buruk sindikat narkoba meliputi pemakai serta pengedar, dampak yang merusak individu serta keluarga, dan pelanggaran hukum. Secara tidak langsung hal tersebut menjadi cara pemimpin yang terpilih dengan cara demokratis untuk memberitahu masyarakat mengenai agenda politiknya. Komitmen fokus Duterte dalam memberantas narkoba dan kriminalitas yang kemudian dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan *War on Drugs*.

3.2 Framing Effects

Lensa yang digunakan *framing effects* oleh publik berfungsi untuk melihat dan mengkaji situasi yang terjadi. Lensa publik digunakan pemimpin untuk membuat kebijakan dan citra mereka terlihat baik. Dalam situasi ini para pemimpin politik menyajikan informasi yang pesan dari informasi tersebut menggunakan suatu cara agar menyesuaikan target masyarakat yang ingin dicapai. Cara yang bisa digunakan adalah melalui identifikasi lensa atau *framing effects* yang melakukan pekerjaannya. Dalam berjalannya proses kebijakan jarang ditemukan informasi netral.

Pemimpin akan berusaha untuk melakukan *reference point* yang tentu saja bertujuan untuk menguntungkan posisi mereka. Dari poin utama yang menjadi

kepentingan pemimpin akan menimbulkan *gain framing* yang sisi positifnya menghindarkan pemimpin dari tindakan yang beresiko, sedangkan *loss framing* akan menimbulkan berbagai pilihan pemimpin yang justru beresiko negatif. Pemimpin yang efektif akan menyoroti situasi yang terjadi menjadi tema yang menarik. Karena dari situasi interaktif yang melibatkan banyak aktor seringkali menjadi permasalahan baru.

Setelah elektabilitas pemilu yang meningkat serta terpilih menjadi presiden, ditambah dengan maraknya kasus yang terjadi menjadi tanggungan Duterte dalam *reference point* yang berfokus dalam upaya untuk memberantas narkoba dan kriminalitas. Duterte berani menjadikan prioritas utama hal tersebut dibanding yang lainnya. Maka dari itu ditetapkanlah kebijakan *War on Drugs* sebagai upaya komitmen Duterte menangani masalah yang ada di Filipina. Keputusan kebijakan yang ditetapkan Duterte sejalan dengan situasi masyarakat yang merasakan keresahan. Dengan menjalankan kebijakan *War on Drugs* semakin meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari sisi politis dan simpati. Mengingat mayoritas masyarakat yang mendukung Duterte berada dalam kalangan kelas menengah yang merasa khawatir terhadap keamanan (Kenny, 2018).

Tindakan Duterte dalam mencapai keuntungan dengan adanya kebijakan *War on Drugs* termasuk dalam *gain framing*. Karena Duterte berusaha mem *framing* dirinya sebagai seseorang yang berkepribadian baik dan menentang apapun yang akan menghambat tercapainya keinginan yang dilakukan. Duterte membenarkan kebijakan *War on Drugs* dengan menyerukan perjuangan mati atau hidup melawan ancaman narkoba (Kine, 2017). Pertentangan yang dilakukan Duterte menolak adanya tuduhan serta investigasi dari ICC. Tuduhan

yang ditujukan mengenai kritik atas jalannya kebijakan yang melanggar HAM. Adanya indikasi *extrajudicial killing* dalam praktik penerapan kebijakan merupakan tindakan yang menurut beberapa masyarakat bahkan internasional tidak adil untuk korban yang dibunuh langsung tanpa adanya proses hukum yang sesuai. Respond Duterte yang konfrontatif terhadap ICC merupakan pertanda otoritas ketegasan yang tidak bisa diganggu siapapun. Tindakan tersebut sangat rasional mengingat kebijakan *War on Drugs* harus tetap berlanjut karena menjadi kepentingan nasional Filipina di pemerintahan Duterte. Peringatan tegas juga Duterte sampaikan kepada kelompok, tokoh asing, serta negara - negara untuk berhenti menyebarkan kebohongan dan melakukan penghinaan kepada negara berdaulat Filipina dengan alasan khawatir terhadap HAM. Berdasarkan Survey Social Weather Station (SWS) bahwasannya mengenai kebijakan *War on Drugs* yang ditetapkan Duterte sebanyak 79% masyarakat puas, 15% masyarakat tidak puas, dan 6% masyarakat ragu - ragu. Alasan utama masyarakat puas dikarenakan berkurangnya tersangka narkoba, perdagangan narkoba, kriminalitas, dan memberikan perlindungan (Parrocha, 2019).

Penerapan strategi kebijakan *War on Drugs* dalam *framing effects* digunakan Duterte untuk mencapai kepentingan dalam kebijakannya menggunakan strategi *set the agenda and the reference point*. Agenda yang menjadikan prioritas utama terhadap kebijakan anti narkoba dan kriminalitas yang diwujudkan dalam kebijakan *War on Drugs*. Protes dari berbagai pihak tidak dihiraukan dan prioritas utama dalam kebijakan yang ditetapkan bisa terus berlanjut. Strategi Duterte dalam menerapkan kebijakan *War on Drugs* dengan memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menjalankan operasinya. Operasi kepolisian yang diterapkan

di Filipina yaitu *Double Barrel* yang terbagi dalam 2 langkah, yaitu *Oplan Tokhang* dan *Oplan High Value Targets* (Philippines National Police, 2016).

Dalam penerapan *Oplan Tokhang* yang lebih bersifat persuasif kepada masyarakat dengan melakukan strategi:

1. Mengumpulkan Informasi

Tahapan ini polisi terlebih dahulu mengumpulkan informasi serta mengidentifikasi oknum dan detail lokasi tempat tinggal. Informasi yang didapatkan harus akurat agar nantinya ketika petugas kepolisian lain yang bertugas bisa menjalankan operasi ke lokasi oknum yang terlibat narkoba secara tepat sasaran, efektif, dan cepat. Karena ketika petugas kepolisian salah sasaran maka memberikan kesempatan oknum untuk kabur.

2. Koordinasi

Tahapan ini kepolisian melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan badan anti narkoba agar operasi lebih optimal. *Barangay Anti Drug Abuse Council* (BADAC) ikut membantu dengan memberikan informasi detail lokasi tempat tinggal oknum yang terlibat narkoba. Petugas kepolisian bagian narkoba juga berkoordinasi dengan *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) untuk persiapan rencana operasi ketika melakukan investigasi rumah - rumah oknum yang terlibat narkoba.

3. Pelaksanaan Operasi

Tahapan ini merupakan pelaksanaan kepolisian ketika operasi beserta investigasi oknum yang terlibat narkoba. Dalam pelaksanaan operasi telah ditentukan tim khusus yang bertugas untuk mendatangi rumah - rumah

sesuai informasi sebelumnya dan dilaksanakan bersamaan secara nasional sesuai arahan Duterte. Prosedur operasi yang dilakukan bisa opsional. Pertama, oknum yang terlibat narkoba bersikap kooperatif ketika proses investigasi maka akan tetap hidup serta diberlakukan adil untuk bisa melanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku. Kedua, jika oknum yang terlibat narkoba melakukan pemberontakan maka kepolisian yang bertugas bisa melumpuhkan atau menembak mati di tempat. Menurut pemerintah atas instruksi Duterte, korban mati dalam operasi kebijakan *War on Drugs* merupakan oknum yang terlibat narkoba.

4. Proses dan Dokumentasi

Tahapan ini bagi kepolisian serta tim yang bertugas wajib melapor hasil operasi maksimal 24 jam setelah pelaksanaan kepada *Regional Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group (RAIDSOTG)*. Bagi para oknum yang terlibat narkoba bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri ketika operasi untuk selanjutnya mengisi keperluan administrasi dengan mengisi formulir. Keluarga serta kerabatnya dihadirkan di kantor kepolisian setempat untuk menjadi saksi oknum yang terlibat narkoba ketika melakukan sumpah di depan notaris, kemudian melakukan investigasi lebih lanjut di kantor kepolisian untuk menyerahkan barang - barang narkoba yang masih disimpan dan memberikan informasi terkait adanya oknum lain yang melakukan hal serupa.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Tahapan ini setelah oknum yang terlibat narkoba menyelesaikan proses hukum, investigasi di kantor kemudian dibebaskan, kepolisian setempat secara berkala akan melakukan pemantauan. Apabila mereka kembali terlibat dalam narkoba maka kepolisian berhak melakukan penangkapan. Setiap pemantauan yang dilakukan kepolisian hasilnya wajib dilaporkan kepada *Regional Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group* (RAIDSOTG) (Philippines National Police, 2016).

Sedangkan, *Oplan High Value Target* menerapkan tindakan yang berbeda kepada masyarakat dengan strategi yang dilakukan secara lebih luas dalam skala regional, kota, provinsi, dan nasional. Operasi anti narkoba yang dijalankan memiliki beberapa fungsi. *Anti Illegal Drug Group* (AIDG) memiliki fokus pemberantasan peredaran narkoba pada tingkat regional, nasional, dan internasional. *Regional Anti Illegal Drug Special Operation Task Group* (RAIDSOTG) fokus pemberantasan narkoba ilegal yang melewati wilayah batas regional. *Provincial Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group* (PAIDSOTG), *District Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group* (DAIDSOTG), dan *City Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group* (CAIDSOTG) fokus pemberantasan narkoba pada tingkat provinsi, distrik, dan kota. Sedangkan *Station Anti Illegal Drugs Special Operation Task Group* (SAIDSOTG) memiliki wilayah operasional pemberantasan narkoba sendiri pada tingkat jalanan sesuai yang tercantum dalam Peraturan DBB No.02 pada tahun 2007.

Sejak diberlakukannya kebijakan *War on Drugs* pada juli 2016 sampai dengan per April 2022 *Oplan High Value Target* menangkap 15.096 target.

Dengan rincian 6.768 dari operasi dampak tinggi, 1.670 dari sarang pengelola narkoba, 4.043 dari daftar sasaran, 797 dari anggota atau pimpinan narkoba, 402 dari pejabat yang terpilih, 529 dari pegawai pemerintah, 295 dari daftar target yang dicari, 78 dari anggota kelompok bersenjata, 126 dari kelompok berseragam, 364 dari orang asing, dan 24 dari tokoh terkenal. Selain itu, pihak berwajib juga menangkap 341.494 target yang terkait dalam sindikat narkoba. Terdapat juga anak dibawah umur yang tertangkap dengan 4.372 target. Dengan rincian 2.635 dari target bius, 1.004 pemilik, 246 mengunjungi sarang bandar narkoba, 18 pegawai sarang bandar narkoba, 10 pengelola sarang bandar narkoba, 1 pekerja laboratorium, 3 pekerja kasar, 2 pelari, dan 453 pengguna narkoba. Anak dibawah umur lebih mendapat perhatian khusus setelah ditangkap serta melalui proses hukum, ditahan polisi selama 8 jam, diserahkan kepada Bahay Pag-asa sebagai pusat reformasi di unit pemerintah daerah, kemudian diberikan bimbingan di Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (Lloyd, 2022).

3.3 Media Effects

Keputusan kebijakan suatu negara bisa dipengaruhi oleh adanya *media effects*. Berkat kemajuan teknologi suatu informasi lebih mudah disebarluaskan tanpa memperhatikan dampak dan kerahasiaan diplomatik. Informasi fokus kepada konflik yang diliput. Faktor yang terjadi dalam mekanisme liputan ditentukan dari pertimbangan kelayakan berita, pembuatan, serta publikasi berita.

Dalam wujud penerapan *media effects* terbagi menjadi 2 aspek *CNN effect* yang memberikan gambaran pengaruh media dalam mendesak kebijakan luar negeri ketika berada di situasi putus asa hingga mendesak mundur dari jabatan

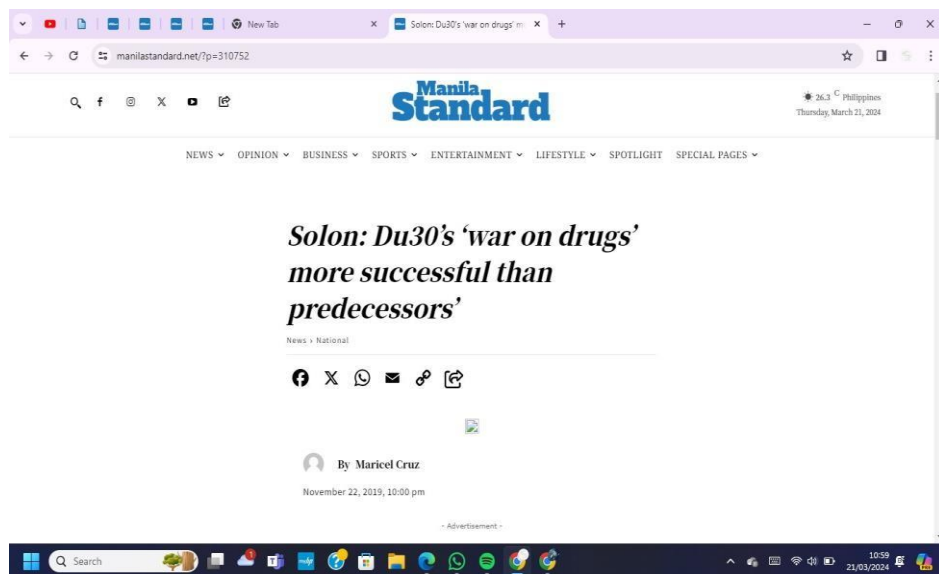
ketika kebijakan yang ditetapkan menimbulkan korban jiwa. *Manufacturing consent* lebih kepada media yang dikontrol oleh elit dan pemerintah untuk menciptakan dukungan dari suatu kebijakan. Persetujuan *manufacturing consent* versi eksekutif dilakukan sesuai kerangka dalam agenda resmi, sedangkan versi elit berita yang diliput bersifat kritis kepada kebijakan eksekutif sebagai konsekuensi adanya disensus elit (Pena, 2003).

Penerapan strategi kebijakan *War on Drugs* dalam *media effects* yang dilakukan Duterte masuk pada kategori *manufacturing consent*. Baik dari Duterte beserta rezim pemerintahannya menggunakan media untuk mengenalkan kebijakan dalam mencari perhatian dukungan kepada masyarakat dengan menjelaskan sisi positifnya. Dengan begitu masyarakat yang percaya bisa mendukung program kebijakan yang ditetapkan Duterte. Beberapa media lokal di Filipina ikut memberitakan sisi positif dan negatif terkait jalannya kebijakan *War on Drugs* serta dampak yang dirasakan masyarakat. Seperti Philstar Global, Manila Bulletin, GMA Network, dan Manila Standard. Adanya media yang memberitakan sisi negatif dari masyarakat yang kontra kebijakan Duterte tidak sepenuhnya benar, karena media yang memberitakan sisi positif kurang mendapat perhatian yang sama.

Media resmi pemerintah Philippine News Agency serta media lokal Filipina yaitu Manila Standard lebih banyak menyebarkan informasi dalam sisi positif dari kebijakan *War on Drugs*. Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat memuji kinerja Duterte dalam perang melawan narkoba dan kriminalitas. Menurut Cavite Elpidio Barzaga Jr kampanye Presiden Duterte lebih berhasil dibanding para presiden pendahulunya. Bahkan langkah keberanian yang dilakukan Duterte

dengan mengungkapkan daftar pengguna yang berkaitan narkoba dari kalangan jenderal, polisi, politisi, anggota peradilan, anggota kongres, dan walikota (Cruz, 2019). Langkah yang telah dilakukan merupakan keberanian dari Duterte dalam melakukan deklarasi publik mengingat permasalahan mengenai narkoba sangat serius dan melibatkan sindikat berpengalaman.

Gambar 3.3 Laman Website Media Manila Standard



Sumber: (Cruz, 2019)

Kepala Staf Direktur *Philippine National Police*, Letjen Guillermo Eleazar menyatakan kampanye melawan narkoba serta kriminalitas mengalami penurunan signifikan. Itu menjadi bukti nyata kebijakan *War on Drugs* Duterte berhasil. Bahkan ketika pertama kali dimulai pada bulan Juli 2016 sampai Juli 2018 menunjukkan penurunan sebesar 21,5% dibanding Juli 2014 hingga Juni 2016.

Dalam rentang tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 9% dibanding tahun 2017 (Araja, 2020). Menurut Eleazar juga bahwa situasi tertib serta damai di setiap daerah telah meningkat karena adanya kebijakan *War on Drugs*, orang - orang pengguna atau pengedar pun menjadi ketakutan. Masyarakat juga berani untuk melapor kepada polisi jika di daerahnya ditemukan pengguna atau pengedar narkoba. Hal itulah yang menurut Eleazar kebijakan *War on Drugs* bisa meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Global Law and Order memasukkan Filipina kepada kategori negara teraman sesuai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah rezim Duterte. Secara keseluruhan Filipina berada di peringkat 12 bersama Polandia, Serbia, Selandia Baru, dan Australia dengan indeks nilai 84 dari 144 negara (Tulfo, 2020). Berdasarkan laporan tersebut membuktikan kebijakan *War on Drugs* yang difitnah dengan hal - hal negatif pada kenyataannya berhasil menciptakan ketertiban dan perdamaian. Pada tahun 2020 di tengah kondisi Covid 19, Duterte bisa bertindak adil dalam menangani permasalahan Covid 19, permasalahan narkoba, dan kriminalitas. Komitmen Duterte dalam kebijakan *War on Drugs* akan tetap terus berjalan yang tentunya dengan bantuan dukungan masyarakat, karena mereka mendapat dampak sisi positif dalam terciptanya perdamaian, keamanan, dan ketertiban yang stabil di masyarakat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permasalahan serius yang terjadi di Filipina dengan maraknya narkoba dan kriminalitas. Banyak sindikat narkoba yang menjadikan Filipina sebagai tujuan dalam pengedaran narkoba atau menjadi tempat transit sebelum dikirim lagi ke negara lain. Spesifik jenis narkoba yang digunakan di Filipina berupa sabu - sabu dan ganja. Rata - rata sindikat narkoba berusia 15 - 64 tahun. Dampaknya tentu saja buruk dengan merusak psikis, kesehatan, dan interaksi dengan orang lain. Selain itu, marak juga terjadi kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Hal tersebut biasa terjadi sehingga memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Terpilihnya Duterte sebagai presiden pada tahun 2016 merupakan harapan baru bagi masyarakat untuk melakukan perubahan. Kebijakan *War on Drugs* menjadi komitmen Duterte yang berfokus dalam memberantas narkoba dan kriminalitas.

Kebijakan *War on Drugs* memberikan respon masyarakat yang terbagi menjadi pro dan kontra. Masyarakat pro merasa terjadi perubahan bagus dengan berkurangnya sindikat narkoba dan kriminalitas. Berbeda dengan respon masyarakat kontra yang tidak melihat hal tersebut dan lebih menyoroti jalannya kebijakan yang melanggar HAM. Banyaknya penggiringan opini negatif masyarakat kontra yang disebarluaskan memberi kesan buruk Duterte beserta kebijakannya. Sehingga masyarakat pro tidak mendapatkan hal yang sama untuk

menyebarkan kesan positif kebijakan Duterte. Maka dari itu strategi *framing* Duterte terhadap kebijakan *War on Drugs* pada tahun 2016 - 2022 untuk mengetahui upaya *framing* yang dilakukan dan jalannya proses kebijakan.

Pemerintah Filipina telah berupaya menciptakan beberapa kebijakan sebelum adanya kebijakan *War on Drugs*. Yaitu dengan dibentuknya PDEA yang berfokus sebagai tim lapangan untuk operasi penyelidikan dalam memberantas narkoba. Sedangkan dibentuknya DDB lebih berfokus pada strategi dalam mengendalikan pemberantasan narkoba seperti dengan adanya sosialisasi pencegahan dan rehabilitasi. Dalam praktik kebijakan *War on Drugs* terbagi dalam 2 operasi. *Oplan Tokhang* merupakan operasi yang mengupayakan langkah persuasif dengan mendatangi rumah oknum untuk dimintai keterangan, ketika oknum tidak kooperatif baru ditembak mati. *Oplan High Value Target* merupakan operasi yang melibatkan banyak pihak karena menangkap sindikat narkoba besar yang berkeliaran di wilayah Filipina atau kabur ke wilayah lain.

Adanya kebijakan Duterte berdampak pada lingkup domestik dan internasional. Di lingkup domestik masyarakat yang pro merasa berkurangnya sindikat narkoba dan kriminalitas yang signifikan. Masyarakat pro juga merasa bisa hidup lebih tenang karena tidak merasa terganggu. Sedangkan masyarakat kontra merasa adanya pelanggaran HAM yang harus diberhentikan agar tidak semakin banyak korban jiwa. Di lingkup internasional ICC memperhatikan situasi yang terjadi di Filipina. ICC tidak tinggal diam serta hendak melakukan investigasi. Namun, Duterte yang mengetahui hal tersebut melakukan respon dengan tindakan yang berbeda. Duterte tidak kooperatif dengan ICC dan memutuskan bahwa

Filipina keluar dari ICC. Hal itu dilakukan Duterte agar kebijakan *War on Drugs* tetap berlanjut tanpa ada gangguan dari luar atau internasional.

Menurut Mintz dan DeRouen dalam teorinya bahwa setiap pemimpin negara memiliki suatu taktik untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang ditetapkan. Salah satu caranya dengan *framing* yaitu menyusun informasi dari suatu peristiwa yang terjadi dengan tujuan membentuk opini baru serta menggiring tanggapan publik secara halus. Tujuannya untuk menciptakan citra atau kesan baru dari yang disampaikan. Aspek yang diperlukan dalam melakukan *framing* dari suatu kebijakan dengan *marketing effects*, *framing effects*, dan *media effects*.

Berikut adalah gambaran *framing* yang dilakukan Duterte apabila dianalisis menggunakan teori Mintz dan DeRouen dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Analisis Strategi *Framing* Duterte dalam Kebijakan *War on Drugs*

Aspek Teori	Pengertian	Analisis
<i>Marketing Effects</i>	Agar mendapat dukungan dari masyarakat, tak jarang pemimpin menyiasati dengan menciptakan atau menampilkan suatu situasi dengan solusi dalam bentuk kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kampanye menggunakan sosial media berupa akun facebook pribadi Duterte. - Melalui kampanye langsung kepada masyarakat ketika orasi.
<i>Framing Effects</i>	Pembingkaiian yang menggambarkan ketika pemimpin menyampaikan penyajian informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Duterte menerapkan <i>gain framing</i> dengan berusaha menciptakan <i>framing</i> dirinya

	yang disampaikan dipengaruhi oleh cara penyajian yang menyesuaikan target masyarakat yang ingin dicapai.	<p>sebagai seseorang yang berkepribadian baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mencapai kepentingan dalam kebijakannya Duterte menggunakan <i>set the agenda and reference point</i>. Dengan menjadikan pemberantasan narkoba dan kriminalitas sebagai prioritas utama dalam kepentingan nasional.
<i>Media Effects</i>	Kemampuan media dalam melakukan pemberitaan mempengaruhi kebijakan, apabila liputannya semakin besar maka dampaknya terhadap masyarakat juga semakin besar.	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan <i>manufacturing consent</i> dengan melibatkan rezim pemerintahan Duterte untuk mengenalkan sisi positif kebijakan melalui media. - Beberapa media yang memberitakan sisi positif kebijakan <i>War on Drugs</i> seperti Philippine News Agency dan Manila Standard.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Duterte melakukan *framing* terhadap kebijakan *War on Drugs* untuk mendapat dukungan masyarakat. Selain itu, di tengah – tengah jalannya kebijakan *framing* yang dilakukan Duterte digunakan untuk melawan masyarakat yang melakukan pemberitaan negatif tentang dirinya dan kebijakan *War on Drugs*. Duterte ingin membuktikan kepada masyarakat mengenai sisi positifnya yaitu adanya perubahan jumlah sindikat narkoba dan

kejahatan yang terus berkurang serta menunjukkan masyarakat yang hidup lebih aman. Janji kampanye Duterte bukan hanya omong kosong tetapi bisa diwujudkan ketika terpilih menjadi presiden melalui penerapan kebijakan *War on Drugs*. Upaya *framing* yang dilakukan Duterte berhasil meyakinkan beberapa masyarakat pro bahwa apa yang dilakukan memang benar dan memberi dampak positif bagi masyarakat di Filipina. Tapi untuk beberapa masyarakat yang kontra mereka tidak bisa dipengaruhi karena mereka punya dasar adanya pelanggaran HAM yang harus diperjuangkan sehingga melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Duterte.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas penulis meyakini terdapat beberapa kekurangan dengan minimnya informasi. Rekomendasi yang diberikan penulis kepada penelitian selanjutnya agar bisa lebih membahas *framing* Duterte terhadap kebijakan *War on Drugs* jika dilihat dari respon negara internasional. Hal ini dikarenakan pada kepemimpinan Duterte tentu saja terdapat perjanjian kerja sama dengan negara lain. Apakah dalam proses kerja sama tersebut ada keraguan atau hambatan dari negara lain mengingat berita mengenai kebijakan *War on Drugs* ini sudah tersebar luas hingga mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio. 2005. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press.
- Araja, Rio. 2020. "Crime rate drop proves drug war gaining." <https://www.manilastandard.net/?p=314435>.
- Ardayan. 2016. "Rakyat Filipina mulai bangkit melawan perang narkoba ala Duterte."Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/dunia/rakyat-filipina-mulai-bangkit-melawan-perang-narkoba-ala-duterte.html>.
- Bintoro, Hafizh Swardana Suryo. 2022. "Analisis Kepemimpinan Rodrigo Duterte dalam Memimpin Negara Filipina." (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.).
- Brenda Jacobs, Dyah Ridhul Airin Daries L. 2021. "Kebijakan Negara Filipina Tentang Penembakan Mati Pelaku Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." 1 (6): 517-530.
- BRI Monitor. 2021. *Are the Risks of the Safe Philippines Project Worth the Potential Benefits?* N.p.: Stratbase ADR Institute for Strategic and International Studies, The Philippines.
- Caliwa. 2019. "Kebangkitan Orang Kuat dan Perang Melawan Narkoba sangat mendesak kepedulian terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." (Asosiasi Pengacara Internasional.).
- Cruz, Maricel. 2019. "Solon: Du30's 'war on drugs' more successful than predecessors." <https://www.manilastandard.net/?p=310752>.

- Department of Foreign Affairs. 2017. "Joint Statement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the People's Republic of China." DFA. <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/14643-joint-statement-between-the-government-of-the-republic-of-the-philippines-and-the-government-of-the-people-s-republic-of-china>.
- DeRouen, Karl J. 2001. *Politics, Economics and Presidential Use of Force Decision Making*. NY: Edwin Mellen Press.
- Effendi, Tolib. 2014. "Hukum Pidana Internasional." (Media Pressindo).
- Gita, Ruth A C. 2022. "Duterte's drug war almost perfect: PDP-Laban Senate bets." <https://www.pna.gov.ph/articles/1172975>.
- Heler, Pritia Tresia. 2021. "Tinjauan Yuridis tentang Extrajudicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* Vol. x No. 12.
- Holmes. 2016. "The Early Duterte Presidency in the Philippines." *The Dark Side of Electoralism: Opinion Polls and Voting in the 2016 Philippine Presidential Election* 35(3): 15-38. file:///C:/Users/hp/Downloads/holmes-2016-the-dark-side-of-electoralism-opinion-polls-and-voting-in-the-2016-philippine-presidential-election.pdf.
- International Criminal Court. 2002. *Founding Treaty: The Rome Statute*.
- International Narcotics Control Strategy Report. 2015. "Philippines: Bureau Of International Narcotics and Law Enforcement Affairs." Wikipedia. <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol1/239006.htm>.
- Kenny, P.D. 2018. "Populism in Southeast Asia." *Cambridge University Press*.

- Kine, P. 2017. *Phillipine President Rodrigo Duterte's 'War on Drugs*. Vol. 38. 3 vols. N.p.: Harvard International Review.
- Lloyd, Christopher. 2022. "Anti-drug campaign strong under PRRD: PDEA." Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1175570>.
- Martin Petty, Neil Jerome Morales. 2019. "Jail me, hang me: Philippines' Duterte says won't answer to ICC." YouTube: Home. <https://www.reuters.com/article/philippines-drugs/jail-me-hang-me-philippines-duterte-says-wont-answer-to-icc-idINKBN1YO17T/>.
- Martono, Joewana. 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mintz Alex, DeRouen Karl. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press.
- Mogato, M. 2017. *Philippines President Duterte's Trust rating Fall Slightly, Poll Shows*. Jakarta: Jakarta Globe.
- Nicole. 2016. "The Early Duterte Presidency in the Philippines." *Politics of Anxiety, Politics of Hope: Penal Populism and Duterte's Rise to Power* 35 (3): 91 - 109. file:///D:/BAHAN%20SKRIPSI/ICC%20Filipina/Referensi%20Jurnal/curato-2016-politics-of-anxiety.pdf.
- Novi. 2018. "ICC Selidiki Duterte Atas Kejahatan Kemanusiaan, Filipina Geram." detikNews. <https://news.detik.com/internasional/d-3857172/icc-selidiki-duterte-atas-kejahatan-kemanusiaan-filipina-geram>.

Parrocha, Azer. 2019. "79% of Pinoys satisfied with drug war, wake-up call to critics." Philippine News Agency.

<https://www.pna.gov.ph/articles/1089379>.

Peña, Kurt D., and Ed Lustan. 2021. "In bid to make PH safe, killings become norm." Inquirer.net.

<https://newsinfo.inquirer.net/1464494/in-bid-to-make-ph-safe-killings-become-norm#ixzz76iX4csJf> .

Pena, Monica. 2003. "News Media and the Foreign Policy Decision-Making Process, CNN or Washington?"

<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mpena.htm>.

Philippine Crime Rate & Statistic. 2024. "Philippines Crime Rate & Statistics 1990-2024|MacroTrends." Macrotrends.

<https://www.macrotrends.net/countries/PHL/philippines/crime-rate-statistics>.

Philippines National Police. 2016. "PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan-Project: "Double Barrel." (July).

<https://didm.pnp.gov.ph/images/Command%20Memorandum%20Circulars/CMC%20201616%20PNP%20ANTIILLEGAL%20DRUGS%20CAMP AIGN%20PLAN%20%20PROJECT%20DOUBLE%20BARREL.pdf> .

Prayuda, R. 2020. "Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia." Volume IX (No 1, 35).

Ranada, Pia. 2016. "A look at the state of crime, drugs in the Philippines."

Rappler.

<https://www.rappler.com/nation/118004-crime-drugs-philippines/>.

R.C. Marquez. 2015. *Philippine National Police 2015 Annual Report*. Philippine: Philippine National Police.

Republic of the Philippine. 2016. *Mission of Command Memorandum Circular No.*

16 – 2016 Subject : PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project:

"Double Barrel". N.p.: National Police Commission.

Reyes. 2016. "The Spectable of Violence in Duterte's War on Drugs." 3 - 4.

Roth, Kenneth. 2018. "World Report 2019: Philippines." Human Rights Watch.

<https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines>.

Salasmita. 2022. "Extrajudicial Killing dalam Kebijakan War on Drugs di Filipina

Ditinjau dari Hukum Pidana Internasional." 18 (December): 121 - 131.

Salaverria, Leila. 2017. "Duterte: Criminals have no humanity." Inquirer.net.

<https://newsinfo.inquirer.net/876970/duterte-criminals-have-no-humanity>.

Sianturi, Gabriel Mallatang. 2021. "Perang Terhadap Narkoba Serta Penarikan

Diri Dari Pengadilan Pidana Internasional Oleh Filipina: Perspektif

Hukum Internasional." *Jurnal Kertha Negara* 9 ((3)): 164 - 174.

Social Weather Stations. 2018. "Third Quarter 2018 Social Weather Survey:

Pinoys maintain anti-Chinese stance on West Philippine Sea issue."

Sri Wahyuni. 2022. "Gaya Kepemimpinan Otoriter (Otokratis) Dalam Manajemen

Pendidikan." *Jurnal edu-Leadership, Jambi, Institut Agama Islam*

Nusantara Batanghari Vol 1 No 2.

Suwarman. 2018. "Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat - Tiongkok di Myanmar."

Journal Asia Pasific Studies, 182.

The Guardian. 2016. "Philippines president Rodrigo Duterte urges people to kill drug addicts."The Guardian.

<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/philippines-president-rodrigo-duterte-urges-people-to-kill-drug-addicts>.

Tulfo, Erwin. 2020. "Peace and order: A campaign promise fulfilled."

<https://www.manilastandard.net/?p=339044>.

United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law.

2010. "International Narcotics Control Strategy Report." United State:

United StatesDepartment of State Bureau for International Narcotics and Law.

Utomo, A.P. 2018. "Duterte Umumkan Filipina Keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional."Wikipedia.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional>.

Wilujeng, Sri Rahaju. 2013. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis

DanYuridis." *Jurnal Ilmu Budaya Universitas Diponegoro* Vol 18, No 2.

